



REPUBLIK INDONESIA

ADVERTORIAL ● ● ●
**NOTA KEUANGAN
DAN RAPBN 2016**

ADVERTORIAL
NOTA KEUANGAN
DAN RAPBN 2016

TANTANGAN APBN KE DEPAN

Fiscal Space Terbatas



Masih ada potensi
perpajakan

Lifting minyak tidak
meningkat

Mandatory Spending dan belanja bersifat wajib masih besar



Dominan belanja wajib
(pegawai dan
operasional, bunga
utang, subsidi)

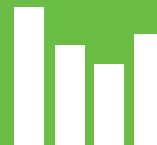
Mandatory spending
(Pendidikan, Kesehatan,
Transfer ke Daerah dan
Dana Desa)

Alokasi belanja belum optimal



Efisiensi belanja
operasional (rapat,
perjalanan dinas, gedung)
Perbaikan perencanaan
belanja produktif

Penyerapan anggaran belum optimal



Belanja K/L masih
berkisar 90%-95%

Realisasi belanja masih
menumpuk pada triwulan
III dan IV

ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2016



Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas

DIMENSI
PEMBANGUNAN MANUSIA

DIMENSI
PEMBANGUNAN SEKTOR
UNGGULAN

DIMENSI
PEMERATAAN & KEWILAYAHAN



Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas



Insentif fiskal;
Peningkatan belanja yang produktif;
Dukungan penjaminan, PMN, dan kerjasama dengan swasta.



Cadangan risiko fiskal
Fleksibilitas fiskal dalam UU APBN



Defisit APBN yang terkendali (2,1% PDB)
Debt ratio dijaga sekitar 26% PDB
Pengendalian keseimbangan primer



RKP
2016



3 DIMENSI
PEMBANGUNAN



TEMA
KEBIJAKAN
FISKAL



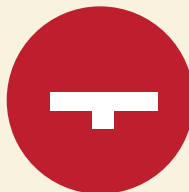
STRATEGI



GAMBARAN UMUM RAPBN 2016



Asumsi dasar ekonomi makro disusun mengikuti perkembangan ekonomi terkini -> pertumbuhan ekonomi lebih realistis.



Defisit anggaran tahun 2016 dikendalikan pada tingkat yang *sustainable* (sekitar 2,1% terhadap PDB) di bawah *outlook* defisit anggaran tahun 2015.



Penerimaan per pajakan ditargetkan lebih realistis (basis perhitungan adalah *outlook* APBNP 2015, dengan pertumbuhan penerimaan per pajakan 14,5%).

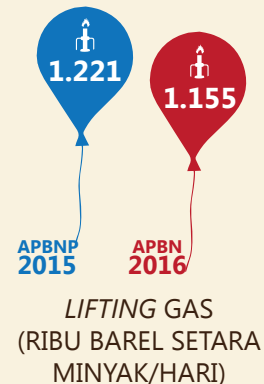
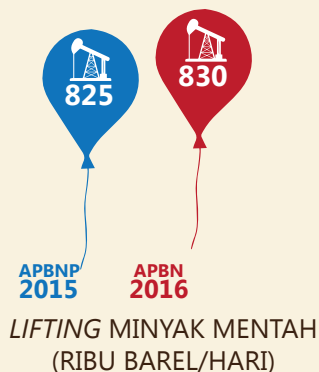
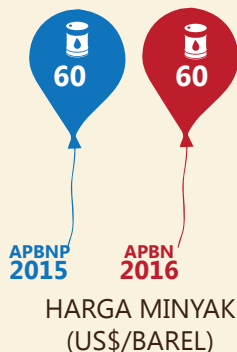
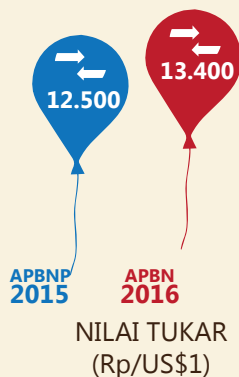
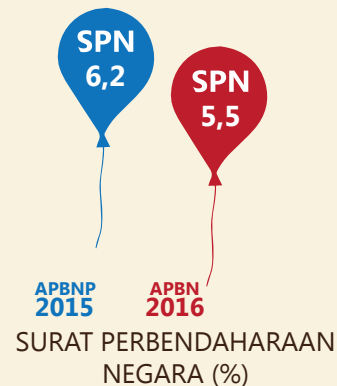
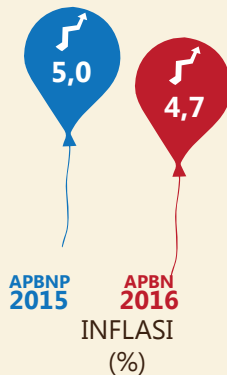
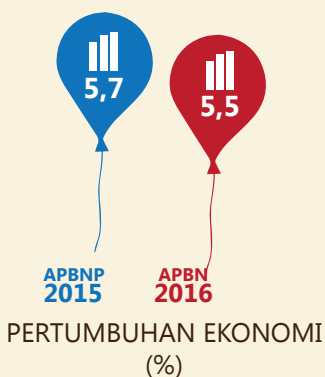


Mencapai target pembangunan:
Tingkat Kemiskinan 9-10%;
Tingkat Pengangguran Terbuka 5,2-5,5%;
Gini Ratio 0,39;
IPM 70,1.



Transfer ke daerah dan dana desa lebih besar dari Belanja K/L, dalam rangka penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO



RINGKASAN RAPBN 2016

(TRILIUN RUPIAH)

URAIAN	2015 APBNP	2016 RAPBN	Selisih
A. PENDAPATAN NEGARA	1.761,6	1.848,1	86,5
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.758,3	1.846,1	87,7
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.489,3	1.565,8	76,5
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	269,1	280,3	11,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,3	2,0	(1,3)
B. BELANJA NEGARA	1.984,1	2.121,3	137,1
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.319,5	1.339,1	19,5
1. Belanja K/L	795,5	780,4	(15,1)
2. Belanja Non K/L	524,1	558,7	34,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	664,6	782,2	117,6
1. Transfer ke Daerah	643,8	735,2	91,4
2. Dana Desa	20,8	47,0	26,2
Total Anggaran Pendidikan	408,5	424,8	16,2
Rasio Anggaran Pendidikan	20,6	20,0	(0,6)
Total Anggaran Kesehatan	74,3	106,1	31,8
Rasio Anggaran Kesehatan Total (%)	3,75	5,0	1,3
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(66,8)	(89,7)	(23,0)
D. SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(222,5)	(273,2)	(50,7)
% Surplus/ (Defisit) terhadap PDB	(1,9)	(2,1)	(0,2)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	222,5	273,2	50,7
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242,5	272,0	29,5
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20,0)	1,2	21,2

PENERIMAAN PERPAJAKAN

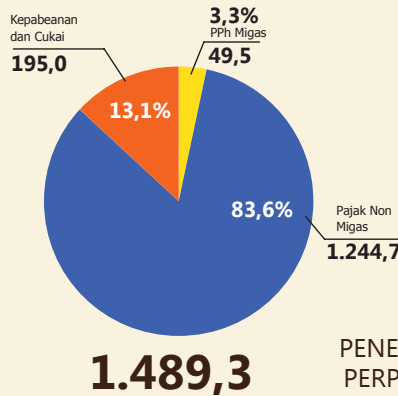
(TRILIUN RUPIAH)

PPh Non Migas direncanakan lebih tinggi dari APBPN 2015 sejalan dengan kebijakan intensifikasi PPh Badan;

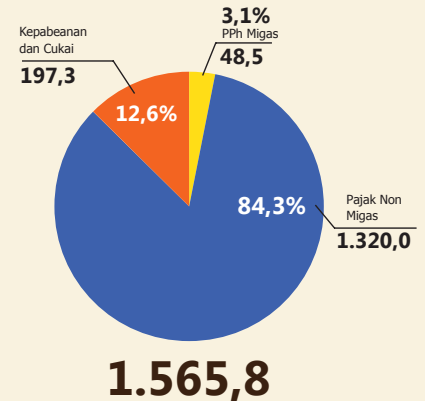
PPN lebih rendah dari APBPN 2015, dipengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi tahun 2015;

Penurunan bea keluar terkait rendahnya harga CPO yang masih dibawah *threshold* tarif bea keluar, dan kebijakan pembentukan dana pendukung sawit (CPO *supporting fund*).

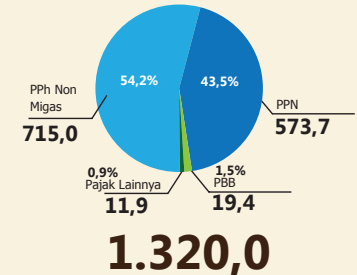
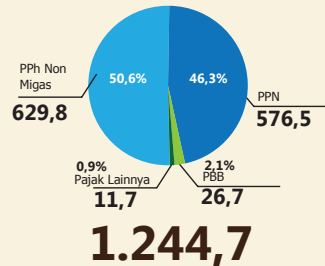
APBPN 2015



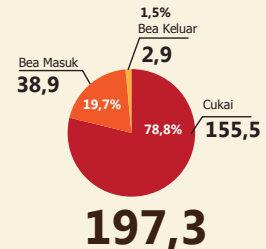
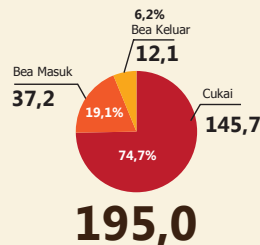
RAPBN 2016



PENERIMAAN PERPAJAKAN



PAJAK NON MIGAS



KEPABEANAN DAN CUKAI

ARAH KEBIJAKAN UMUM PERPAJAKAN

Ekstensifikasi & Intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat

Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi, serta akuntabilitas

Dukungan insentif fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional.

KEBIJAKAN TEKNIS

Penyempurnaan peraturan perundangan termasuk revisi UU KUP dan persiapan revisi UU PPh dan UU PPN;

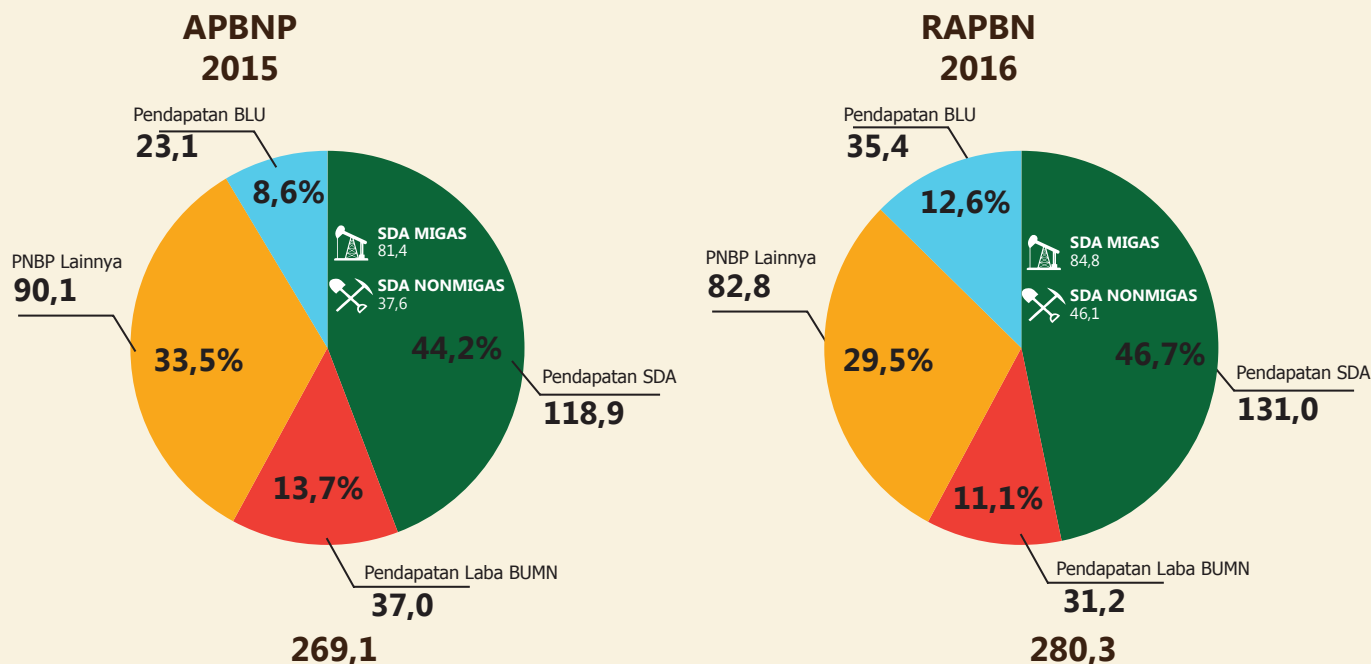
Peningkatan kepatuhan wajib pajak, implementasi *e-tax invoice*, *e-SPT* dan *e-filing*.

Memperkuat kerangka hukum dan implementasi peraturan di bidang kepabeanan;

Implementasi penuh *billing system* MPN generasi 2.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

(TRILIUN RUPIAH)



Pendapatan SDA migas dipengaruhi oleh kenaikan *lifting* minyak dan pelemahan nilai tukar;

Pendapatan SDA non migas meningkat utamanya berasal dari optimalisasi pertambangan mineral dan batubara;

Target pendapatan BLU mengalami kenaikan dengan dibentuknya BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

ARAH KEBIJAKAN UMUM PNBP

Optimalisasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di sumur migas baru;

Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan);

Melanjutkan renegotiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dan melakukan *review* atas tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara;

Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan kegiatan penangkapan ikan;

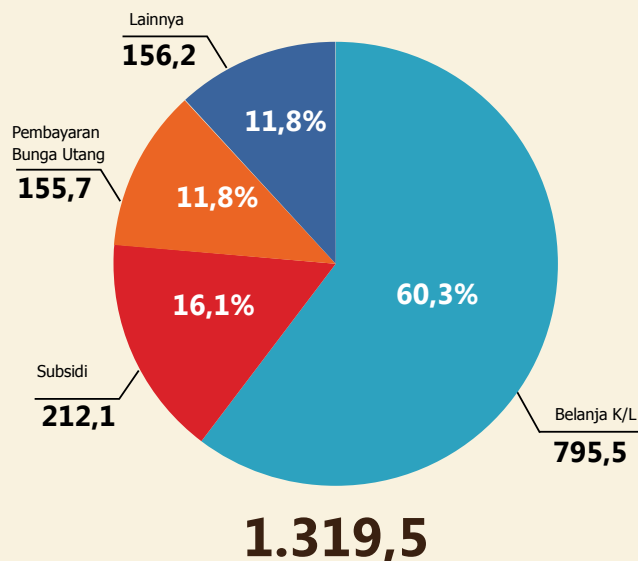
Mengenakan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan peranannya sebagai agen pembangunan;

Perbaikan tarif PNBP Kementerian Negara/Lembaga serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.

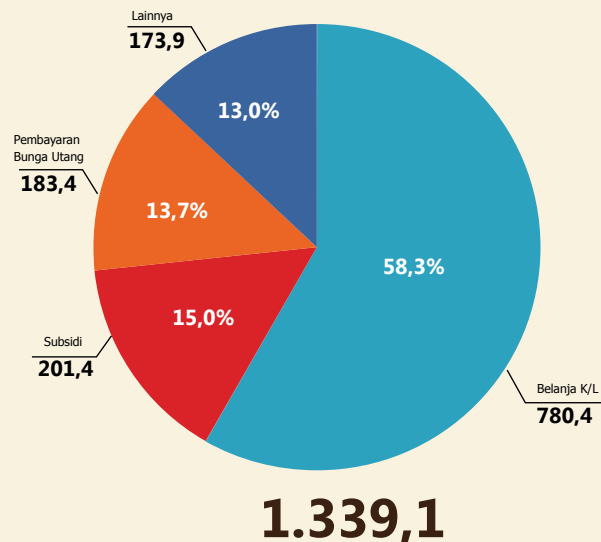
BELANJA PEMERINTAH PUSAT

(TRILIUN RUPIAH)

APBNP
2015



RAPBN
2016



POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dengan memperhatikan tingkat inflasi untuk memacu produktivitas dan peningkatan pelayanan publik dalam bentuk pemberian THR (selain kebijakan *baseline*: pemberian gaji dan pensiun ke 13);

Melanjutkan kebijakan efisiensi pada belanja operasional dan penajaman belanja nonoperasional (termasuk moratorium pembangunan gedung pemerintah, serta kebijakan *sewa/leasing* untuk pengadaan kendaraan dinas operasional);

Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang tepat sasaran dan penajaman/ perluasan program kredit usaha rakyat;

Melanjutkan program prioritas pembangunan (a.l: pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, dan pengurangan kesenjangan) dan memperkuat pembangunan infrastruktur untuk memperbaiki kualitas pembangunan;

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan dengan dukungan anggaran 20% dari APBN.

Meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (baik dari sisi *demand* maupun *supply*) dan ketenagakerjaan, termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya;

Menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke DAK;

Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas;

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta Keluarga Sangat Miskin;

Menyediakan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);

10 BELANJA K/L TERBESAR

(TRILIUN RUPIAH)

	URAIAN	LKPP 2014 (Audited)	APBNP 2015	RAPBN 2016
1	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT *)	72,8	118,5	103,8
2	KEMENTERIAN PERTAHANAN	86,2	102,3	95,9
3	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	44,0	57,1	67,2
4	KEMENTERIAN KESEHATAN	47,5	51,3	64,8
5	KEMENTERIAN AGAMA	45,7	60,3	58,5
6	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	28,7	65,0	50,2
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	76,6	53,3	49,2
8	KEMENTERIAN KEUANGAN	18,1	25,7	40,5
9	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI **)	0,5	43,6	38,0
10	KEMENTERIAN PERTANIAN	13,2	32,8	32,9
	JUMLAH 10 K/L TERBESAR	433,1	609,8	601,0
	K/L LAINNYA	144,0	185,7	179,4
	TOTAL	577,2	795,5	780,4

*) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada LKPP 2014 (Audited) masih bernomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum

***) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi pada LKPP 2014 (Audited) masih bernomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi

SASARAN PEMBANGUNAN KELOMPOK PROGRAM BIDANG PEREKONOMIAN



Pembangunan jalan 375,9 km dan jembatan 6.283,9 m
Pemeliharaan jalan 43.506 km dan jembatan 338.690,9 m



Embung & penampung air lainnya 228 buah;
Normalisasi sungai dan pembangunan /peningkatan tanggul 119 km;
Infrastruktur SPAM di kawasan nelayan 20.000 Sambungan Rumah (SR)
& di kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar 105.280 SR




Produksi padi 76,23 juta ton,
Produksi jagung 21,35 juta ton
Produksi kedelai 2,03 juta ton




Produksi daging sapi/kerbau 588,56 ribu ton
Produksi telur 3.393,36 ribu ton
Produksi susu 850,77 ribu ton

Penambahan luas tanam padi 60 ribu ha,
Penambahan luas baku lahan padi 200 ribu ha,
Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas
500.000 ha
Meningkatkan kualitas air di 7 DAS prioritas dan 1 danau prioritas

 Kemen PU & PR:
Rp103,8 T

 Kementan:
Rp32,9 T

 Kemen LH dan Kehutanan
Rp6,3 T

SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



92,4 jt penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui JKN/KIS

APK SD/SDLB/Paket A 97,85%;
APK SMP/SMPLB/Paket B 81,89%;
APK PAUD 72,1%;
APK Perguruan Tinggi 28,16%

Siswa pendidikan dasar dan menengah yang menerima KIP 19,2 juta siswa;



APK MI/Ula 13,29%, **APK Mts/Wustha** 22,59%, dan **APK MA/Ulya** 8,83%; Siswa MI/Ula, Mts/Wustha, dan MA/Ulya penerima KIP masing-masing sebanyak 860.339 siswa, 961.529 siswa, dan 507.489 siswa




77% persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 Kunjungan neonatal pertama (KN1) sebesar 78%

700 kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi, 190 kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 RSUD terakreditasi




Jumlah keluarga sangat miskin yang mendapat bantuan tunai bersyarat sebanyak 58,30%

 Kemendikbud:
Rp49,2 T

 Kemenag:
Rp58,5 T

 Kemenkes:
Rp64,8 T

 Kemensos:
Rp15,3 T

SASARAN PEMBANGUNAN KELOMPOK BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN



Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras matra darat 20% dan Pengadaan 116 unit rantis (matra darat); Pengadaan 184 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut); Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara)



Pembentukan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan dan Prolegnas sebesar 80%; WBP dan tahanan yang taat hukum guna meningkatkan partisipasi pembinaan dan pembimbingan untuk mewujudkan reintegrasi sosial sebesar 75%




Menurunnya gangguan keamanan pada jalur aktivitas masyarakat moda transportasi laut 35%; Penyelesaian tindak pidana narkoba 66%; Penyelesaian tindak pidana umum 52%




Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset di 7.094 desa; Meningkatnya pemanfaatan NIK, data base kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat di 25 K/L (kumulatif)

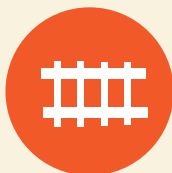
 Kemenhan:
Rp95,9 T

 Kemendagri:
Rp4,96 T

 Polri:
Rp67,2 T

 Kemenkumham:
Rp10,1 T

SASARAN PEMBANGUNAN KELOMPOK BIDANG KEMARITIMAN



Pembangunan jalur kereta api 110,9 km sp dan jembatan/*underpass*/*flyover* KA 27 unit, BRT 530 unit; Pembangunan 94 unit kapal perintis penumpang dan barang; Trayek perintis dan PSO sejumlah 96 trayek dan 22 kapal; Pembangunan bandara di 11 lokasi; Pengembangan bandar udara di daerah perbatasan dan rawan bencana masing-masing di 26 lokasi dan 57 lokasi




Lifting minyak bumi sebesar 800-830 ribu bopd; **Lifting** gas bumi sebesar 1.100-1.300 ribu boepd; Produksi biofuel, biogas, dan uap panas bumi masing-masing sebesar 6,48 juta KL, 22.995 ribu m³, dan 83,05 juta ton




Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton;
Produksi perikanan budidaya sebanyak 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, dan 1,9 miliar ekor ikan hias



Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW

 Kemenhub:
Rp50,2 T

 Kemen KKP:
Rp15,8 T

 Kemen ESDM :
Rp8,9 T

ANGGARAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN INFRASTRUKTUR

(TRILIUN RUPIAH)

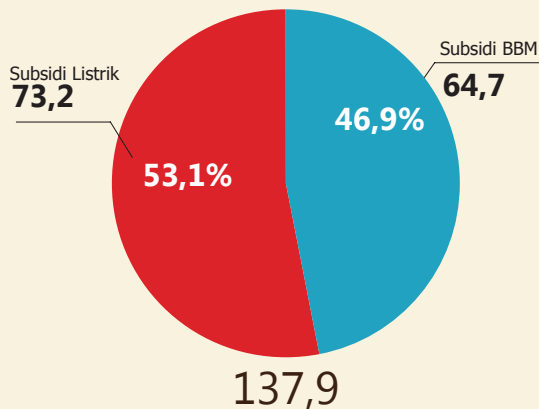
	Uraian	APBN 2015	RAPBN 2016
	Anggaran Pendidikan	408,5	424,8
	<i>(persentase terhadap belanja negara)</i>	20,6%	20,0%
	<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat	154,4	143,8
	<input type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa	254,2	275,9
	<input type="checkbox"/> Pembiayaan Anggaran	-	5,0
	Anggaran Kesehatan	74,3	106,1
	<i>(persentase terhadap belanja negara)</i>	3,75%	5,0%
	<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat	63,0	84,0
	<input type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa	7,8	22,1
	<input type="checkbox"/> Pembiayaan Anggaran	3,5	-
	Anggaran Infrastruktur	290,3	313,5
	<input type="checkbox"/> Belanja Pemerintah Pusat	213,6	183,9
	<input type="checkbox"/> Transfer ke Daerah dan Dana Desa	41,0	79,4
	<input type="checkbox"/> Pembiayaan Anggaran	35,7	50,3

SUBSIDI ENERGI

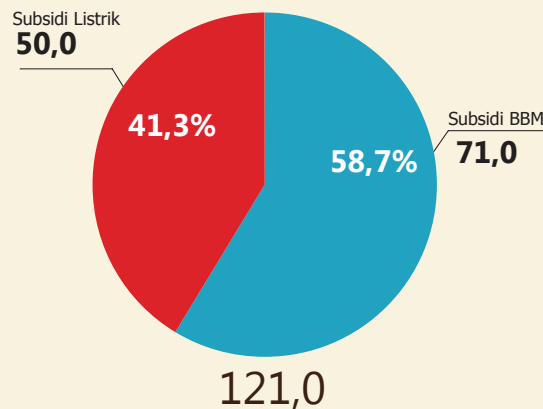
2015-2016

(TRILIUN RUPIAH)

**APBN
2015**



**RAPBN
2016**



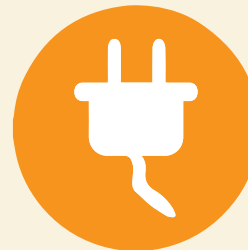
PERBAIKAN KEBIJAKAN SUBSIDI ENERGI



SUBSIDI BBM

Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG Tabung 3kg;

Kenaikan harga LPG tabung 3 kg sebesar Rp1.000/kg;



SUBSIDI LISTRIK

Perubahan sistem subsidi menjadi lebih tepat sasaran (subsidi langsung).

Diberikan kepada 30 juta pelanggan (450 VA dan sebagian pelanggan 900 VA).

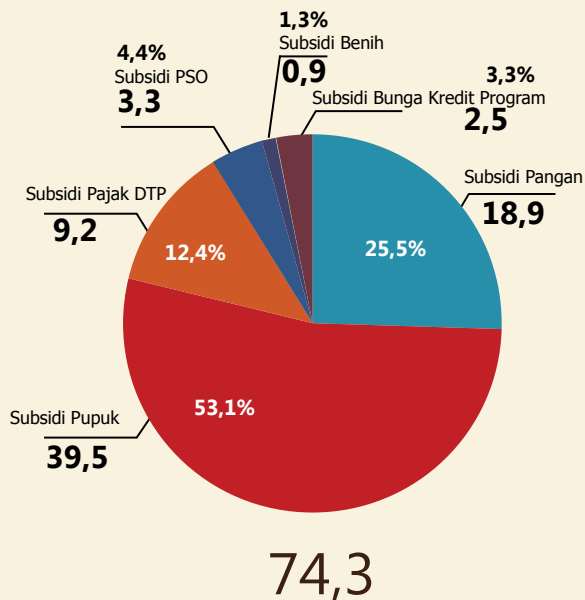
Subsidi Listrik tahun 2016 Rp50 triliun (subsidi tahun berjalan Rp40 triliun dan kurang bayar tahun sebelumnya Rp10 triliun).

SUBSIDI NONENERGI

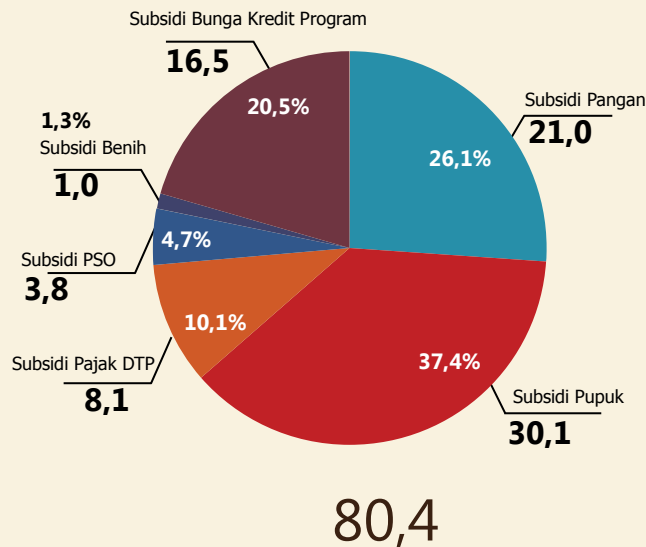
2015-2016

(TRILIUN RUPIAH)

**APBNP
2015**



**RAPBN
2016**



PENAJAMAN & PERLUASAN KEBIJAKAN SUBSIDI NONENERGI



SUBSIDI PANGAN

Diberikan kepada 15,5 juta RTS (rumah tangga sasaran)

Durasi penyaluran 12 kali

Kuantum sebanyak 15 kg per RTS per bulan

Harga jual raskin Rp1.600,00 per kg



SUBSIDI PUPUK

Volume pupuk bersubsidi 9,55 juta ton

HPP mendekati harga keekonomian dan rencana kenaikan HET untuk mengurangi disparitas harga pupuk.



SUBSIDI BUNGA KUR

Sasaran: KUR mikro, KUR ritel, dan KUR TKI

Sektor yang dibiayai: sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan (termasuk TKI)

Alokasi Subsidi Bunga KUR tahun 2016 sebesar Rp10,5 triliun

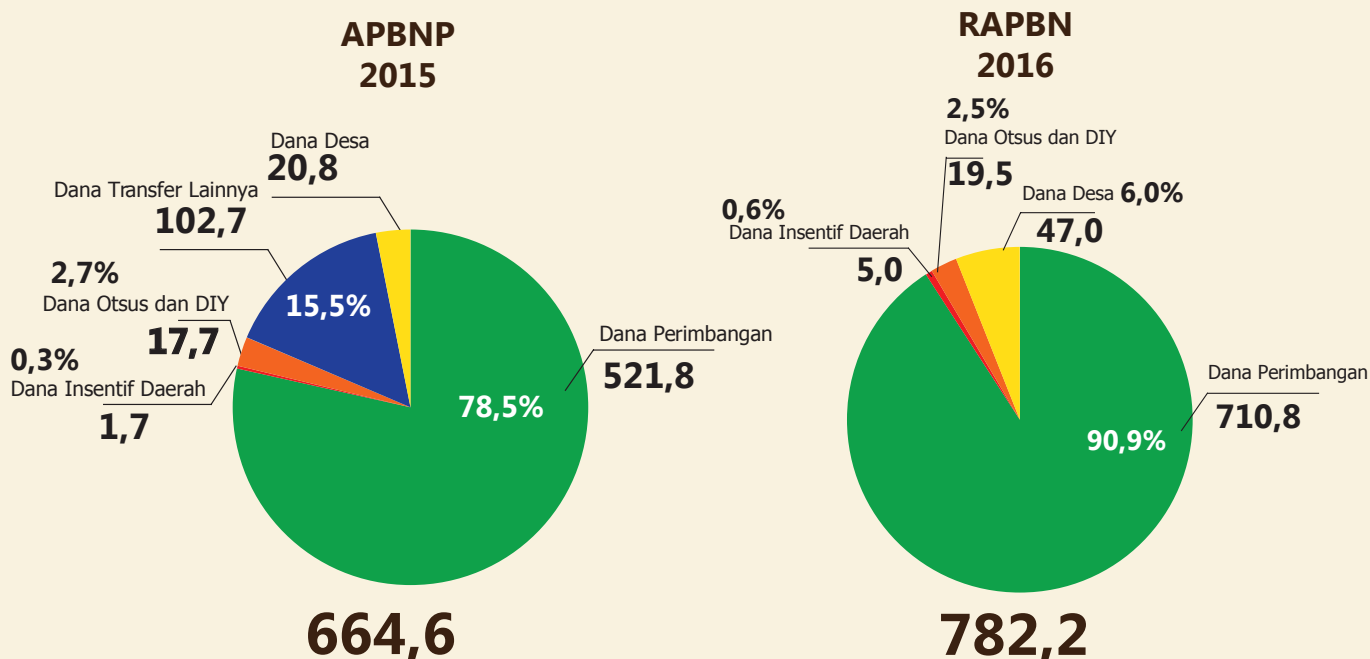
Tingkat Suku Bunga KUR ke *end user* sebesar 9% per tahun

Subsidi bunga KUR oleh Pemerintah 8,5% per tahun

Coverage KUR Rp100 T – Rp123 T

PENINGKATAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

(TRILIUN RUPIAH)



Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar dari Belanja K/L;

Peningkatan Dana Transfer Khusus (dh. DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID);

Dana Desa sebesar 6,4% dari dan di luar Transfer ke Daerah -> sekitar Rp628,5 juta per desa.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA



TRANSFER KE DAERAH

Melanjutkan kebijakan afirmatif Dana Transfer Khusus (DTK, dh. DAK) yang diprioritaskan pada bidang infrastruktur dasar -> Meningkatkan alokasinya.

Penajaman bidang DTK sehingga lebih efektif, selektif, dan optimal pemanfaatannya.



DANA DESA

Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6,4 persen dari dan diluar transfer ke daerah -> pemenuhan 10 persen di tahun 2017.

Mengefektifkan program-program yang berbasis desa sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa

PEMBIAYAAN ANGGARAN

(TRILIUN RUPIAH)

URAIAN	APBNP 2015	RAPBN 2016
PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II)	222,5	273,2
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	242,5	272,0
1. Perbankan dalam negeri	4,8	5,5
2. Non-perbankan dalam negeri	237,7	266,5
a.l: - Surat Berharga Negara (neto)	297,7	326,3
- Penyertaan Modal Negara	(70,4)	(48,2)
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(20,0)	1,2
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	48,6	72,8
a. Pinjaman Program	7,5	34,6
b. Pinjaman Proyek	41,1	38,3
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(4,5)	(5,9)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64,2)	(65,7)

Anggaran PMN lebih rendah dari APBNP 2015

Pembiayaan luar negeri (neto) positif.

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN

Pembiayaan Utang:

Pemanfaatan potensi pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat

Digunakan untuk pembangunan yang produktif

Penghematan biaya pinjaman utang

Diversifikasi portfolio pinjaman

Pengendalian rasio utang pada tingkat yang aman (26% PDB)

Pembiayaan Non-utang:

Mempertajam alokasi PMN

- Pengurangan PMN
- Memberdayakan BUMN untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur

Dukungan pembangunan satu juta rumah melalui FLPP

Dukungan pemberdayaan KUMKM melalui PMN PT Askrindo (Persero), Perum Jamkrindo, dan PT BPUI (Persero)

Investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang melalui program beasiswa di LPDP

Copyright @ 2015

Direktorat Penyusunan APBN
Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sutikno Slamet Lantai 18
Jalan Dr Wahidin Raya No 1
www.anggaran.depkeu.go.id
penyusunan.apbn@depkeu.go.id